

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YESI RAHMAWATI

C100140240

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN

TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

(Di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

OLEH:

YESI RAHMAWATI

NIM: C.100.140.240

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Shallman Al-Farizy, S. E., S. H., MM., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 7 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Shalman Al-Farizy, S.E, S.H, MM, M.Kn (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Jaka Susila, S.H, M.Si, M.H (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H, M.H (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727086803

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



YESI-RAHMAWATI
C.100.140.240

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta)**

Abstrak

Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dianggap dapat memberikan hasil lebih besar dengan kurun waktu yang lebih relatif singkat, dengan pengumpulan data pendaftaran tanah dilakukan serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Penyelenggaraan Pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan serta tertib administrasi pertanahan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang melakukan komparasi antara aturan yang ada dan fakta-fakta dilapangan, kemudian digunakan jenis penelitian secara deskriptif. Analisa data yang digunakan merupakan metode analisa kualitatif, penelitian yang ditinjau dari Badan Pertanahna Nasional Kota Surakarta. Data-data yang diperoleh dalam penelitian in meliputi studi kepustaka dan wawancara kelapangan.

Kata Kunci: Hukum hak atas tanah, Penyelenggaraan pendaftaran tanah, Pertanahan

Abstract

The acceleration of the implementation of a complete systematic land registration is an acceleration in the provision of legal certainty and legal protection of people's land rights in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open and accountable manner, so as to improve the welfare and prosperity of the community. Complete systematic land registration is considered to be able to provide greater results in a relatively short period of time, by collecting data on land registration carried out simultaneously on all land plots in a village / kelurahan area. Organizing Land registration in the community is a state duty carried out by the Government for the benefit of the people in order to guarantee legal certainty in the land sector and orderly land administration. The type of data used includes primary data and secondary data. The approach method in this study uses empirical juridical that compares the existing rules and facts in the field, then uses descriptive type of research. Analysis of data used is a qualitative method of analysis, a study of the National Land Agency Surakarta. The data obtained in this study include literature studies and field interviews.

Keywords: Land title law, Land registration, Land Affairs

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dari mana pun baik sosial, politik atau kultur.¹ Tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak miliknya.²

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun kearah perkembangan industri dan lain sebagainya.³ Di Indonesia negaralah yang mempunyai peranan kuat dalam menguasai hak atas tanah, dengan negara menguasai hak atas tanah negara dapat meminimalisir sengketa pertanahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechtscadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan Sertifikat yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan langkah oprasional untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rancangan kerja yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah dan dilaksanakan di wilayah desa atau/ kelurahan.

Dalam Percepatan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil,

¹ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal.09

² Andrian Sutedi, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakara: Sinar Grafika, hal.01

³ *Ibid*, hal.01

⁴ *Ibid*, hal.05

merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berdasarkan menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) program PTSL. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dianggap dapat memberikan hasil lebih besar dengan kurun waktu yang lebih relatif singkat, dengan pengumpulan data pendaftaran tanah dilakukan serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Dengan adanya pendataan yang serentak ini akan lebih mengurangi sengketa mengenai batas bidang tanah dan hak milik atas sebuah tanah yang sampai sekarang masih sering terjadi.

Masalah yang diujikan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta. (2) Bagaimana penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Pada tahap penulisan ini, penelitian menggunakan metode *yuridis empiris* yaitu, sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data tidak saja studi kepustakaan tetapi juga penelitian lapangan dengan masyarakat secara riil atau nyata.⁵ Adapun jenis dari *deskriptif*, yaitu tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶ Analisa data yang digunakan merupakan metode analisa *kualitatif*, penelitian yang ditinjau dari Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta.

Kemudian sumber data yang penulis dalam penelitian ini terdiri dari “Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asalnya dari yang pertama belum diulang dan diuraikan orang lain”⁷ dan “Data Sekunder antara lain

⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Sripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal.63

⁶ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hal.16

⁷ *Ibid*, hal.65

mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya”.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan Pendaftaran tanah melalui program PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan pertama kali secara serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Republik Indonesia dengan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah didesa/kelurahan yang telah di tunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional, kegiatan ini dilaksanakan pemerintah guna untuk seluruh bidang tanah yang belum terdaftar dapat didaftarkan dalam program PTSL yang dibuat pemerintah dengan hasl akhr tanah yang belum bersertifikat dapat diterbitkan sertifikat bagi pemilik tanah tersebut. Tujuan dari program PTSL ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada pemilik tanah secara pasti, terselenggaranya tertib administrasi dibidang pertanahan serta mencapai target dalam program PTSL ini pada tahun 2025 seluruh tanah yang ada di Indonesia telah terdaftar, di tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak 7 juta telah terdaftar, diakhir tahun tercapai 9 juta bidang tanah terdaftar, dalam hal ini terjadi kenaikan sebanyak 2 juta sehubungan dengan adanya program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Diharapkan dengana adanya program ini seluruh masyarakat yang belum mempunyai serifikat dapat menikmati manfaat dari pentingnya pendaftaran tanah dan mempunyai sertifikat tanah yang dapat menjamin hak atas tanah yang dimiliki.

Dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang telah dibiayai oleh pemerintah, berdasarkan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun 2017 mendapatkan alokasi dana dalam program PTSL sebayak 765 bidang tanah dengan menetapkan 3 kecamatan dan 15 kelurahan, dengan dana yang di realisasikan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 160.267.500,-.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hal.12

Pemerintah telah mengupayakan dengan keras dalam hal untuk memberikan sertipkat hak atas tanah dengan program ini masyarakat dibebaskan dari biaya apapun dengan itu diharapkan dapat menyadarkan terhadap pandangan masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran tanah dan sebuah sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya untuk kehidupan mereka, dan pemerintah pun dapat dengan mudah menertibkan administrasi, tertib pemeliharaan tanah dalam bidang pertanian dalam Catur Tertib Pertanahan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dilaksanakan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta yang dibantu oleh tim adjudikasi dalam penyelenggaranya yang telah dibuat jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program PTSL, dengan target selama 9 bulan dalam proses pelaksanaan diperkirakan tidak melebihi 1 tahun anggaran karna anggaran yang didapat dari pemerintah maka dari itu harus terstruktur dan terdaftar sesuai jadwal yang telah ditentukan yang dimulai pada bulan April 2017 dan selesai pada bulan Desember 2017.

Berdasarkan hasil peneilitan pelaksaan pendaftaran tanah dalam program PTSL yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah sesuai dengan peratuarn yang telah berlaku dengan dimuali pada bulan april 2017 dengan kegiatan persiapan, penyuluhan, puldadis atau pengumpulan data fisik dan data yuridis setelah data itu terkumpul dilaksanakan pengelolaan data yuridis, pemeriksaan tanah, pemberian pengumuman, pengakuan, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat dengan hasil akhir penyeraharan sertifikat kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam program PTSL yang diselenggarakan pada desa/kelurahan yang telah dilaksanakan, Setelah terlaksana program PTSL ini dengan memberikan sertipkat kepada masyarakat dilaksanakan pengelolaan warkah atau pendokuemtasian data fisik dan data yuridis dan dibuatkan laporan hasil kegiatan dalam program PTSL ini.

3.2 Penyelesaian Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dibadan Pertanahan Nasional Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan pendaftan tanah secara sistematis dengan program PTSL ini Tim Ajudikasi menemui beberapa hambatan-hambatan yang terjadi selama kegiatan pelaksanaan program PTSL di Badan Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut: Sebagian masyarakat ada yang belum paham tentang pentingnya proses pendataan dalam pendaftaran tanah dengan program PTSL ini.

Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham terkait pentingnya proses pendatan secara pemberkasan meskipun sudah dilakukan sosialisas dan penyuluhan. Selain itu dalam proses pendataan seperti ketika akan dilaksanakan pengukuran kelapangan oleh petugas Tim Ajudikasi yang ditunjuk untuk mengukur lokasi pemilik tanah yang seharusnya berada juga dilokasi namun hal ini sebaliknya ada sebagian masyarakat yang tidak berada dilokasi untuk memastikan luas dan batas-batas tanah yang dimilikinya, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan waktu yang berulur-ulur. Dilihat dari realita terjadi dilapangan, hal tersebut diatasi dengan mengupayakan semaksimal mungkin panitia memberikan arahan kembali terkait pemberkasan dan melengkapi apa yang kurang dari berkas permohonannya dalam keikut sertanyanya dalam program PTSL ini terutama petugas Puldadis oleh tim kerjanya dan disampaikan kembali ke masyarakat di bantu oleh kepala desa setempat serta dalam pengukuran tanah yang seharusnya telah diukur petugas harus mengulang lagi pengukuran kelokas yang belum diukur dan mencocokan data tentang luas dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh pemohon.

Terdapat bidang-bidang tanah yang berada dibantaran sungai yang dikuasai oleh pemohon yang menunggu diterbitkannya Site Plan (rencana tapak) dari pemerintah.

Dengan diterbitkan sertipikat sesuai dengan SK GSS (Garis Sempadan Sungai) meski batasnya tanah yang dimiliki oleh pemohon lebih dari SK GSS

namun sertipkat yang diterbitkan sesuai dengan GSS tidak boleh melebihi GSS. Maka tak jarang terjadi ketidak sepakatan masyarakat setempat dengan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karna harus mengikuti peraturan yang telah dibuat sesuai SK GSS (Gari Sempadan Sungai). Dilihat dari realita terjadi dilapangan, hal tersebut diatasi dengan mengupayakan semaksimal mungkin dari Pemerintah Kota berkoordinasi dengan kelurahan dan instansi teknis yang terkait untuk menentukan GSS (Garis Sempadan Sungai) tanah-tanah yang telah dihuni oleh sebagian dari masyarakat setempat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitan tentang pelaksanaan melalui program pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan pendaftaran dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Wilayah Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Nomor. SP DIPA.-056.01.2.432530/2017 Revisi ke 01 pada tanggal 22 Maret 2017, Kantor Pertanahan Kota Surakarta mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan PTSL persertpikatan tanah sebanyak 765 bidang tanah. Pelaksanaan program PTSL dimulai pada bulan April 2017 dan selesai pada bulan Desember 2017 yang pelaksanaanya telah sesuai dengan target 765 bidang tanah dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang telah dibiayai oleh pemerintah, berdasarkan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun 2017 mendapatkan alokasi dana dalam program PTSL sebanyak 765 bidang tanah dengan menetapkan 3 kecamatan dan 15 kelurahan, dengan dana yang di realisasikan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 160.267.500,-. Pemerintah telah mengupayakan dengan keras dalam hal untuk memberikan sertipkat hak atas tanah dengan program ini masyarakat dibebaskan dari biaya apapun dengan itu diharapkan dapat menyadarkan terhadap pandangan masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran tanah dan sebuah sertfikat hak atas tanah yang dimilikinya

untuk kehidupan mereka, dan pemerintah pun dapat dengan mudah menertibkan administrasi, tertib pemeliharaan tanah dalam bidang pertanahan dalam Catur Tertib Pertanahan.

Penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, Sebagian masyarakat ada yang belum paham tentang pentingnya proses pendataan dalam pendaftaran tanah dengan program PTSL ini.

Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham terkait pentingnya proses pendatan secara pemberkasan meskipun sudah dilakukan sosialisas dan penyuluhan. Selain itu dalam proses pendataan seperti ketika akan dilaksanakan pengukuran kelapangan oleh petugas Tim Ajudikasi yang ditunjuk untuk mengukur lokasi pemilik tanah yang seharusnya berada juga dilokasi namun hal ini sebaliknya ada sebagian masyarakat yang tidak berada dilokasi untuk memastikan luas dan batas-batas tanah yang dimilikinya, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan waktu yang berulur-ulur. Dilihat dari realita terjadi dilapangan, hal tersebut diatasi dengan mengupayakan semaksimal mungkin panitia memberikan arahan kembali terkait pemberkasan dan melengkapi apa yang kurang dari berkas permohonannya dalam keikut sertanyanya dalam program PTSL ini terutama petugas Puldadis oleh tim kerjanya dan disampaikan kembali ke masyarakat di bantu oleh kepala desa setempat serta dalam pengukuran tanah yang seharusnya telah diukur petugas harus mengulang lagi pengukuran kelokas yang belum diukur dan mencocokan data tentang luas dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh pemohon.

Terdapat bidang-bidang tanah yang berada dibantaran sungai yang dikuasai oleh pemohon yang menunggu diterbitkannya Site Plan (rencana tapak) dari pemerintah.

Dengan diterbitkan sertipikat sesuai dengan SK GSS (Garis Sempadan Sungai) meski batasnya tanah yang dimiliki oleh pemohon lebih dari SK GSS namun sertipkat yang diterbitkan sesuai dengan GSS tidak boleh melebihi GSS. Maka tak jarang terjadi ketidak sepakatan masyarakat setempat dengan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karna harus mengikuti

peraturan yang telah dibuat sesuai SK GSS (Gari Sempadan Sungai). Dilihat dari realita terjadi dilapangan, hal tersebut diatasi dengan mengupayakan semaksimal mungkin dari Pemerintah Kota berkoordinasi dengan kelurahan dan instansi teknis yang terkait untuk menentukan GSS (Garis Sempadan Sungai) tanah-tanah yang telah dihuni oleh sebagian dari masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Efendie, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-peraturannya*, Bandung: Penerbit Alumn

Harsono, Budi, 2008, *Hukum Argaria Indonesia*, Jakarta : Djambatan

Hadikusuma, H. Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harsono, Budi, 2008, *Hukum Argaria Indonesia*, Jakarta : Djambatan

Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Komprehensif*, Jakarta : Prenadamedia Group

Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Penelitian Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Santoso, Urip, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika

Sutedi, Andria, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yamin Lubis, Mhd, dan Rahim Lubis, Abd, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung : Mandar Maju.

Yamin Lubis, Mhd, dan Rahim Lubis, Abd, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif*

Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, Bandung: Mandar Maju

Zainal Asikin, Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Amin Handoko, 2010, *Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Tesis, Semarang: Universitas diponegoro Semarang

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1995;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Undang-undang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.